

PERAN INDUSTRI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DALAM MENYIAPKAN TENAGA KERJA

Oleh
Pardjono

Abstrak

Perkembangan pembangunan di Indonesia telah menunjukkan hasil yang nyata, dengan dimulainya industri-industri menghasilkan barang-barang ekspor. Teknologi juga telah berkembang pesat di segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kemajuan ini akan berdampak luas pada masalah ketenagakerjaan. Pendidikan kejuruan sebagai lembaga pendidikan formal belum sepenuhnya dapat menyiapkan tenaga kerja siap pakai bagi industri dan bisnis.

Pendidikan non formal yang bersifat fleksibel dan praktis, pragmatis dipilih sebagai alternatif pemecahan masalah ketenagakerjaan ini, yaitu industri dan pendidikan, BLK dan kursus-kursus vakasional yang ada di masyarakat, untuk dioptimalkan perannya dalam Repelita V dan VI nanti.

PENDAHULUAN

Industri dan bisnis di Indonesia telah menunjukkan perkembangannya yang pesat pada akhir Repelita IV. Perkembangan ini akan terus ditingkatkan pada Repelita-Repelita berikutnya yaitu pada Repelita V dan pada Repelita VI karena sektor Industri mendapat penekanan sesuai dengan yang amanatkan dalam GBHN.

Kebijaksanaan Pemerintah dalam hal diversifikasi sumber pendapatan negara dalam upaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor non migas dari selain pajak, telah dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi munculnya industri-industri baru. Dengan munculnya berbagai industri yang menghasilkan berbagai jenis barang produksi maka kebutuhan tenaga kerja dalam berbagai bidang pekerjaan juga meningkat, sehingga variasi dan diferensiasi jenis keahlian dan struktur pekerjaan yang dibutuhkan juga meningkat. Di samping itu timbul pula penciptaan bidang-bidang keahlian akibat penerapan pola pengembangan produktivitas dan efisiensi kerja yang mutlak diperlukan dalam dunia industri. Dengan demikian timbullah spesialisasi-spesialisasi dalam bidang pekerjaan yang semakin meranting.

Sekolah Kejuruan maupun sekolah-sekolah lain yang menyiapkan tenaga kerja secara langsung belum sepenuhnya mampu menyediakan tenaga

kerja dalam berbagai bidang pekerjaan yang dibutuhkan oleh dunia industri dan bisnis serta bidang-bidang lainnya. Kesenjangan ini diperkirakan akan semakin besar karena cepatnya perubahan-perubahan dalam dunia kerja yang disebabkan pengaruh kemajuan dan inovasi teknologi. Di lain pihak kemampuan pemerintah dalam menyediakan tenaga kerja juga terbatas dana, fasilitas maupun sumber daya manusianya. Sementara semakin hari akan semakin banyak kebutuhan tenaga kerja dalam berbagai jenis keahlian sejalan dengan akselerasi jalannya pembangunan di segala bidang kehidupan. Di samping itu Sekolah Kejuruan sekarang ini masih berfungsi sebagai lembaga "social service", belum secara penuh berfungsi sebagai lembaga pencetak pekerja untuk memenuhi "manpower need". Terbukti masih ada misi dan keterlibatan sekolah-sekolah Kejuruan untuk meningkatkan daya tampungnya, dalam hal ini sebenarnya berarti telah menyimpang dari kerangka misi lembaga pencetak tenaga kerja yang harus lebih berorientasi pada kebutuhan lapangan kerja.

Kesenjangan kemampuan pemerintah dalam penyiapan tenaga kerja yang semakin spesifik dan beragam merupakan masalah yang perlu penanganan serius dan segera agar tidak sampai terjadi stagnasi perkembangan kemajuan pembangunan di Indonesia.

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DI INDONESIA

Mulai Repelita IV pembangunan di Indonesia telah menggunakan pendekatan industrialisasi. Pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui industrialisasi diharapkan dapat mendatangkan kemajuan dan perbaikan hidup masyarakat secara merata dan menyeluruh. Karena industrialisasi sebagai pendekatan pembangunan melibatkan ilmu teknologi, diharapkan pembangunan akan lebih efisien dan efektif. Hal ini juga telah dialami oleh negara-negara industri maju, yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup rakyatnya seperti misalnya: Jepang, Amerika, Inggris, Jerman Barat dan lain-lain.

Industrialisasi meningkatkan kapasitas manusia dalam berproduksi, dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi yang tahap demi tahap berkembang. Keterampilan tradisional tidak cukup lagi untuk membuat mesin dan peralatan yang diperlukan untuk meningkatkan akselerasi proses produksi. Karakteristik industrialisasi modern dalam sistem politik maupun ekonomi yang bagaimanapun menunjukkan kecenderungan universal yaitu: makin kompleksnya teknologi, meningkatnya spesialisasi-spesialisasi, semakin mengglobalnya standarisasi dan keseragaman, dan adanya kecenderungan membentuk unit yang lebih besar (Hadiwaratama, 1984).

Pola pengembangan industri nasional dari Repelita ke repelita berikutnya yang dimulai dari Repelita IV seperti berikut (Dept. Perindustrian, 1985):

**Pola Pengembangan Industri Nasional
Pada Repelita IV, V dan VI**

Repelita IV	Repelita V	Repelita VI
Peletakan Kerangka Landasan.	Pemantapan Kerangka Landasan.	Kondisi tinggal Landas.
<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Industri yang sejauh mungkin diarahkan untuk pendalaman dan pemantapan struktur industri serta dikaitkan dengan sektor ekonomi lainnya.2. Pengembangan Industri permesinan dan elektronika penghasil barang modal.3. Pengembangan Industri kecil.4. Pengembangan program ekspor komisi Industri.5. Pengembangan kemampuan Research & Development khususnya perangkat lunak, rancang bangun & perekayasaan.6. Pengembangan kemampuan tenaga industrial, manajemen, keahlian kejuruan, keterampilan kewiraswastaan.	<ol style="list-style-type: none">A.1. Optimasi kapasitas terpasang dan peningkatan efisiensi.2. Pengamanan proyek-proyek sesuai jadwal.3. Pelaksanaan Program keterkaitan antar industri dan antar sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya.4. Penyempurnaan iklim secara kontinyu. <p>B. Pemanfaatan secara efektif pasaran dalam negeri sehingga dapat dicapai:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemanfaatan kapasitas Nasional secara optimal.2. Dan merupakan landasan yang kuat untuk pelaksanaan program ekspor.	<p>(Industri mampu tumbuh dan berkembang sendiri)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Struktur Industri telah kuat, keterkaitan dan kedalaman struktur, import bahan baku dan bahan penolong relatif kecil.2. Industri mesin dan elektronika telah berkembang, ketergantungan relatif berkurang.3. Industri kecil telah tangguh.4. Ekspor komoditi Industri telah mampu memberikan sumbangan nyata bagi ekspor komoditi non migas.5. Kemampuan Research dan Development, rancang bangun & perekayasaan telah mampu mendukung pengembangan industri dasar, hilir dan kecil.6. Tenaga profesi serta wiraswasta telah tersedia dalam jumlah yang memadai.

(Sumber: Berita Industri, Th. XVII, 1985)

Dari pola pengembangan industri nasional ini jelas bahwa tahap pembangunan Repelita V ini merupakan langkah pemantapan kerangka landasan yang telah dimulai dari Repelita IV.

Pengembangan industri tidak bisa dipisahkan dengan pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi di Indonesia selama ini difokuskan pada tercapainya persiapan era tinggal landas sejalan dengan pola pengembangan industri nasional itu, yang diharapkan tercapainya pada akhir Repelita V. Dan selanjutnya kita akan sampai pada era tinggal landas yang akan dimulai pada awal Repelita VI. Untuk itu Pemerintah telah mempersiapkannya sesuai dengan amanat GBHN dengan merencanakan pengembangan teknologi secara bertahap, yang meliputi empat tahapan yaitu: tahap penerapan teknologi, tahap integrasi teknologi, tahap penyempurnaan dan tahap pengembangan (Didin S Sastrapraja, 1983). Tahap penerapan dimaksudkan untuk menerapkan teknologi-teknologi yang telah ada di dalam negeri maupun di luar negeri dalam proses-proses produksi untuk memperoleh nilai tambah dalam memproduksi barang-barang yang telah ada di pasaran. Tahap integrasi teknologi dimaksudkan untuk pembuatan-pembuatan barang-barang baru yang belum ada di pasaran dengan pengintegrasian teknologi dalam desain maupun manufaktirnya. Tahap selanjutnya adalah tahap penyempurnaan dan pengembangan teknologi untuk merancang produk di masa datang dengan melibatkan penelitian-penelitian terapan. Tahap terakhir adalah tahap pengembangan ilmu dan teknologi dengan melalui penelitian-penelitian dasar. Dengan melalui pentahapan ini teknologi akan berkembang pesat secara horisontal maupun secara vertikal.

Perkembangan horisontal ditandai dengan semakin banyak munculnya teknologi-teknologi yang baru yang semula belum ada. Di kalangan bisnis dan bidang manajemen telah secara luas digunakan komputer untuk mengolah data, mengatur pengeluaran, mengatur daftar barang secara cepat dan efektif sehingga efisiensi kerja dapat dicapai dengan baik. Akhir-akhir ini bioteknologi telah dikembangkan dalam bidang pertanian dan peternakan dengan hasil yang mengagumkan dengan diperolehnya bibit unggul, maupun cara-cara pertanian dengan menggunakan teknologi nuklir. Perkembangan vertikal terlihat semakin canggihnya teknologi yang terlibat dalam berbagai bidang kehidupan seperti industri, bisnis, pendidikan, jasa, komunikasi dan bidang-bidang lainnya. Dalam bidang industri telah banyak kita saksikan penggunaan mesin-mesin digital, bahkan mesin-mesin dengan kendali komputer seperti CNC (Computer Numerical Control), CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Assisted Manufacturing), dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efektifitas kerja.

Dalam bidang komunikasi kita telah memiliki satelit komunikasi Palapa yang tingkat teknologi yang sama hanya dimiliki oleh negara-negara maju. Penggunaan komputer secara luas di segala bidang dan penggunaan

komunikasi ini menunjukkan sedikit banyak kita telah terlibat dengan teknologi maju dan era informasi telah menjarah dalam kehidupan masyarakat kita.

Gambaran ini cukup menyadarkan kepada kita bahwa dari sudut perkembangan masyarakat, Indonesia telah memasuki tingkat masyarakat agraris, industri dan informasi secara simultan. Hal ini juga akan berdampak luas terhadap sistem penyediaan tenaga kerja. Namun begitu, karakteristik masyarakat industri akan lebih mewarnai pada tahap Repelita V maupun VI nanti dan teknologi madya dapat diperkirakan banyak diadopsi dalam dunia industri, seperti yang disinyalir oleh Menpora Akbar Tanjung bahwa Teknologi Madya masih tetap relevan dalam pembangunan di abad informasi dan komunikasi seperti sekarang ini (Kedaulatan Rakyat, 10 Juli 1989).

MASALAH-MASALAH KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Pengangguran

Masalah pengangguran merupakan masalah klasik yang dialami oleh hampir semua negara di dunia, baik oleh negara maju maupun oleh negara-negara berkembang. Faktor-faktor penyebab timbulnya pengangguran itu kadang-kadang berbeda antara negara maju dan berkembang. Yang menarik untuk dicermati dan dikaji dari fenomena ketenagakerjaan di Indonesia adalah meningkatnya jumlah tenaga terampil dan terdidik yang tidak memperoleh lapangan kerja.

Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan timbulnya pengangguran, antara lain adalah laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dan faktor pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja sehingga lulusannya tidak dapat diserap oleh lapangan kerja yang tersedia.

Dampak perubahan teknologi juga dapat mengakibatkan pengangguran. Dampak ini sering dialami oleh negara-negara maju pada umumnya karena penggunaan teknologi canggih yang serba otomatis akan mereduksi jumlah tenaga kerja. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, penyebab yang paling dominan adalah kedua faktor yang disebutkan pertama. Meskipun dalam beberapa kasus, beberapa perusahaan telah menggunakan teknologi canggih, sebagai konsekuensi strategi alih teknologi kita yang ditempuh dengan sistem melompat-lompat, namun teknologi madya masih akan mendominasi dunia Industri di Indonesia.

Sering pula kita dengar bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena perkembangan ekonomi yang menurun akibat resesi ekonomi yang berkepanjangan. Jumlah pengangguran terdidik juga semakin lama semakin besar dan menjadi masalah yang rawan dan cenderung membawa dampak yang cukup serius dalam bi-

dang sosial, politik maupun keamanan. Proyeksi para perencana pendidikan di masa lalu telah menghasilkan keputusan untuk menyediakan tenaga kerja yang terdidik dalam jumlah yang besar, tetapi setelah dihasilkan ternyata tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya yang produktif. Fenomena paradoxal ini adalah adanya ketidaksesuaian antara pengetahuan serta keterampilan yang dipelajari di sekolah dengan tuntutan dunia kerja. (Slamet Ph, 1989). Bahkan Presiden Suharto di depan para peserta Rapat Kerja Depdikbud dengan nada yang sama dengan pendapat ini menyatakan bahwa kesulitan memperoleh pekerjaan menurut beliau bukan karena tidak tersedianya lapangan kerja, melainkan karena pendidikan mereka tidak sesuai dengan pekerjaan itu (Kedaulatan Rakyat, 12 Juli 1989).

Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja tercipta karena adanya produksi barang dan jasa. Semakin banyak barang produksi dan varietas jenis barang, akan meningkat pula kesempatan kerja. Kesempatan kerja juga dipengaruhi oleh perubahan teknologi. Dengan demikian untuk mengetahui besarnya tambahan kesempatan kerja perlu diprakirakan besarnya produk yang akan dihasilkan serta kecenderungan perubahan teknologi yang akan terjadi apabila terjadi pergeseran prioritas pada struktur produksi.

Dalam setiap tahapan Repelita, pemerintah telah banyak melakukan berbagai kebijakan ekonomi yang mendorong terjadinya pergeseran prioritas struktur produksi dalam upaya meningkatkan ketahanan ekonomi. Dalam Repelita V ini struktur produksi mengalami pergeseran, dari struktur produksi yang mengandalkan hasil pertanian, bergeser kepada struktur produksi yang mengandalkan hasil-hasil industri dengan dukungan kuat dari bidang pertanian. Pergeseran peranan sektor ekonomi ini secara sistematis memang diciptakan dan didorong oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan-kebijakan deregulasi dan debirokratisasi dalam bidang ekonomi, yang membuahkan hasil pada kemampuan ekonomi nasional dalam menyerap angkatan kerja.

Sebagai gambaran tentang keadaan kesempatan kerja disampaikan data riil seperti berikut ini. Data ini diambil pada awal tahun 1989. Keadaan pada bulan Januari 1989 ratio pencari kerja yang terdaftar terhadap permintaan tenaga kerja yang terdaftar terhadap permintaan tenaga kerja adalah 8,66 : 1. Walaupun pencari kerja yang terdaftar jauh lebih besar dari permintaan tenaga kerja, akan tetapi tidak semua permintaan tenaga kerja dapat dipenuhi. Pemenuhan kesempatan kerja itu hanya 75%. Dua puluh lima persen permintaan tenaga kerja tidak dapat dipenuhi. Hal ini akibat tidak terpenuhinya syarat yang dimiliki oleh pencari kerja tersebut yang terutama disebabkan oleh kurangnya keterampilan. Permintaan tenaga kerja menurut golongan pokok jabatan tercatat lowongan yang belum dipenuhi

yang paling banyak adalah tenaga kerja produksi yaitu 44,7%. Permintaan tenaga kerja yang belum terpenuhi paling besar menurut jenis lapangan usaha adalah pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebanyak 45,28%. (Depnaker, 1989).

PERAN INDUSTRI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DALAM PENYIAPAN TENAGA KERJA

Upaya pemerintah dalam penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam masa pembangunan telah banyak dilakukan melalui pendidikan formal. Pendidikan kejuruan, jenis pendidikan formal yang memang mengemban misi penyiapan tenaga kerja mendapat prioritas penting. Telah banyak upaya yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas sekolah-sekolah kejuruan antara lain dengan melengkapi alat dan mesin-mesin, penyempurnaan kurikulum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja, peningkatan kualitas guru dan sarana serta prasarana lainnya.

Meskipun begitu masih sering terdengar suara-suara bahwa lulusan sekolah kejuruan masih belum siap pakai dan sementara para ahli pendidikan nampaknya setuju bahwa pendidikan tidak semestinya menghasilkan lulusan siap pakai. Pendidikan kejuruan seyogyanya menitikberatkan usahanya pada pengembangan individu anak didik dan bukan pengembangan keterampilan anak didik untuk memenuhi persyaratan kerja tertentu (Sukanto, 1983). Bahkan Vembriarto (1987) berpendapat bahwa pendidikan di sekolah tidak akan pernah mampu menghasilkan tenaga kerja siap pakai karena jenis pekerjaan di masyarakat sangat banyak. Lebih-lebih dengan kemajuan teknologi yang pesat yang tidak mungkin sekolah dapat menyelenggarakan program dengan diferensiasi yang sangat banyak ragamnya untuk memenuhi kebutuhan itu. Sementara kebutuhan akan tenaga kerja dalam berbagai bidang pekerjaan akan terus meningkat pada masa-masa memasuki industrialisasi. Apa yang diuraikan di atas adalah sebagian realitas yang ada dalam sistem pendidikan kejuruan kita.

Selain melalui jalur pendidikan formal penyiapan tenaga kerja bisa dilakukan melalui jalur non formal yaitu lembaga-lembaga latihan kejuruan (Vocational training). Lembaga Latihan Kejuruan mempunyai Tujuan spesifik yaitu melatih seseorang untuk dapat memenuhi persyaratan pekerjaan tertentu sehingga tidak dapat lepas dari konsep kegunaan sosial (Social Utility) (Sukanto, 1983). Sedangkan karakteristik pendidikan non formal menurut Soleh Marjuki adalah: (1) program jangka pendek (2) tidak dibatasi atas jenjang-jenjang, (3) usia didiknya tidak perlu homogen (4) sasaran didiknya berorientasi jangka pendek dan praktis (5) diadakan sebagai respon kebutuhan yang mendesak, (6) ijazah biasanya kurang berperan (7) dapat diselenggarakan pemerintah dan swasta (8) Dapat diselenggarakan di dalam dan di luar kelas. (Sismanto, 1984). Dengan ini nampak bahwa pen-

didikan non formal tidak terikat dengan syarat-syarat yang ketat sebagaimana sistem pendidikan formal. Sasaran didiknya berorientasi pada respon kebutuhan yang mendesak dengan prinsip praktis dan pragmatis. Dalam Undang-Undang Pendidikan no. 2, th. 1989 ditegaskan bahwa pendidikan non formal (Pendidikan luar sekolah) tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.

Konsep yang ditawarkan ini bukan merupakan konsep tandingan dari konsep pendidikan kejuruan tetapi justru merupakan mitra. Potensi pendidikan non formal dalam membantu sekolah Kejuruan khususnya dalam menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam era pembangunan ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Pendidikan non formal juga mempunyai misi yang sama dengan pendidikan formal dalam mengaktualisasikan potensi manusia. Bahkan pendidikan non formal menekankan kepada anak didiknya untuk berswabelajar dan berswakarya dalam meningkatkan kemampuan dan taraf hidupnya.

Dalam realitas kancah, eksistensi pendidikan non formal diakui oleh masyarakat terutama yang bergerak dalam bidang kejuruan. Pendidikan non formal dengan sifat fleksibilitas yang dimilikinya dapat diatur sedemikian rupa dalam pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan. Isi yang diberikan dapat secara luas dan bisa juga bersifat khusus untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang bersifat spesifik. Tenaga pengajar tidak memerlukan syarat-syarat yang ketat sehingga ada kemungkinan guru tidak memiliki ijazah tertentu tetapi mempunyai keahlian dalam bidang yang diperlukan. Dengan sifat pendidikan non formal yang nampak serba sederhana ini tampaknya mudah dilaksanakan dengan biaya yang relatif murah.

Industri dan Perusahaan

Industri dan perusahaan merupakan badan bentuk usaha yang banyak membutuhkan tenaga kerja. Dalam penerimaan tenaga kerja merekalah yang sering menghendaki kualifikasi tertentu sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Namun dalam kenyataannya kualifikasi itu tidak selalu bisa terpenuhi oleh lulusan sekolah. Yang mengherankan lagi dari pihak industri sendiri belum ada kemauan untuk membantu pendidikan kejuruan dalam menyiapkan tenaga kerja untuk mereka. Bantuan baru terbatas pada fasilitas praktek kerja yang penanganannya juga belum efektif.

Dalam mengatasi ketidaksesuaian kualifikasi pihak Industri berusaha menyelenggarakan program pendidikan bagi calon tenaga kerjanya sendiri untuk penyesuaian dan kesiapan mereka dalam pekerjaan. Telah banyak industri dan perusahaan yang memiliki Pusdiklat sebagai konsekuensi penyediaan tenaga kerja siap pakai dengan kualifikasi yang dikehendaki.

Dalam konteks permasalahan ketenagakerjaan secara makro maka fungsi Pusdiklat dapat diperluas dan dioptimalkan untuk menyediakan

tenaga kerja siap pakai bagi perusahaan yang sejenis. Perusahaan yang telah maju dan memilih teknologi maju sebaiknya melaksanakan latihan semacam ini, minimal dalam dimensi kecil dalam bentuk magang. IPTN Bandung telah melaksanakan program semacam ini dalam beberapa bidang keahlian seperti CAD, CNC dan administrasi, yang out putnya dapat bekerja di perusahaan lain.

Lembaga Kursus dan Latihan Kerja

Lembaga-lembaga pendidikan dan kursus-kursus merupakan bentuk sekolah non formal yang banyak kita jumpai di masyarakat. Peran lembaga ini dapat ditingkatkan dalam penyiapan tenaga kerja. Selama ini kursus-kursus itu telah banyak membantu pemerintah dalam menanggulangi pengangguran. Akhir-akhir ini banyak kita saksikan munculnya kursus-kursus keterampilan seperti keterampilan otomotif, elektronika, refrigerator, las, komputer dan lain-lain. Kemunculan itu membuktikan adanya fleksibilitas dari lembaga pendidikan non formal. Ciri inilah yang sesuai dengan kondisi masyarakat industri karena struktur dan diferensiasi jenis pekerjaan berubah cepat.

Dalam menghadapi tantangan dalam pengadaan tenaga kerja pada Repelita V dan Repelita VI yang akan datang, pihak swasta yang mengelola kursus keterampilan dapat lebih ditingkatkan peran sertanya. Pemerintah dapat membantu dengan memberikan fasilitas kemudahan, pengakuan keahlian dan keterampilannya. Untuk itu perlu dilakukan akreditasi dan sertifikasi. Akreditasi merupakan pengakuan terhadap eksistensi lembaga kursus yang telah teruji mengenai kualitas tertentu. Sertifikasi diberikan kepada lulusan yang telah menempuh program pendidikan pada lembaga yang dikreditasi.

Balai Latihan Kerja adalah lembaga pendidikan non formal yang dikelola oleh Departemen Tenaga Kerja. Balai Latihan ini bertugas menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang dibutuhkan secara lokal, regional maupun nasional dengan penekanan prioritas pada kebutuhan lokal. Bidang keahlian yang dikursuskan, seperti, keterampilan industri, peternakan, pertanian, perkebunan, jasa dan keterampilan lainnya. Sebagai Lembaga Latihan Kejuruan (Vocational Training), Balai Latihan Kerja dapat memberikan keterampilan yang spesifik dalam waktu yang relatif singkat.

Pemerintah telah mengembangkan BLK ini sejak Repelita II. Dalam Repelita III pemerintah melanjutkan pembangunan dan tersebar di seluruh propinsi. Pada akhir Repelita IV BLK telah ada pada hampir tiap Kabupaten terutama di Pulau Jawa. Dalam Repelita V dimana kita berada pada tahap pemantapan persiapan masuk pada era industrialisasi peran BLK semakin penting. Peran ini akan semakin penting nanti kalau kita masuk

pada tahap Repelita VI. Karena dalam masyarakat industri dunia ketenagakerjaan berubah sangat cepat. BLK sebagai lembaga non formal yang memiliki kemampuan dalam merespon kepesatan dunia industri akan sangat penting perannya dalam menyiapkan tenaga kerja.

KESIMPULAN

Masalah relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja adalah merupakan masalah penting yang harus diperhatikan dalam dunia pendidikan kita dewasa ini. Lebih-lebih pada masa pembangunan dan masa persiapan untuk tinggal landas. Dengan perkembangan industri dalam negeri yang semakin meningkat maka tuntutan relevansi itu semakin mendesak. Sementara pemanfaatan teknologi baru di industri yang dewasa ini makin luas dan relatif cepat menambah lebar kesenjangan antara pendidikan dan dunia industri sehingga realisasi relevansi itu semakin jauh. Di sisi lain sekolah kejuruan sebagai lembaga sekolah formal yang bertugas menyiapkan tenaga kerja secara langsung saat ini belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tenaga kerja dalam berbagai bidang pekerjaan.

Industri dan lembaga-lembaga pendidikan non formal dengan ciri fleksibilitasnya yang tinggi dalam merespon perkembangan dunia kerja diharapkan dapat menjawab tantangan ini bila dikelola dengan tepat. Beberapa industri maju yang ada dengan fasilitas dan peralatannya dapat menyediakan tenaga kerja yang memiliki tingkat teknologi maju. Pusdiklat yang dimiliki dapat ditingkatkan dan diperluas fungsinya, karena selama ini ternyata telah dapat menyediakan tenaga kerja siap pakai bagi industri itu sendiri secara efektif. Peran pusdiklat dapat ditingkatkan dan kemampuannya dapat dioptimalkan untuk menyediakan tenaga kerja siap pakai bagi industri dan perusahaan sejenis.

Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga-lembaga pendidikan non formal lainnya dapat mengadopsi pola pendekatan pendidikannya yang reaktif sehingga dapat merespon kebutuhan dunia kerja dengan cepat. Selain itu pendidikan non formal mampu pula menyediakan tenaga kerja dalam berbagai bidang pekerjaan dengan ketrampilan yang spesifik dalam masa pendidikan yang relatif singkat. Dengan demikian peran mereka sangat penting dalam masa Repelita V dan Repelita berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Didin S. Sastrapraja (1983), *Berita Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. th. 27 Nomor 4. Jakarta.
- Dept. Perindustrian (1985), *Berita Industri*. Majalah Departemen Perindustrian. Edisi Khusus Th XVII/85, Jakarta.

- Dept. Tenaga Kerja (1989). *Berita Pasar Kerja*, Buletin No. 12 Februari. Jakarta.
- Hadiwiratama (1984). *Pendidikan Kejuruan untuk meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Nasional*. Analisis Pendidikan. No. 3 Th V. Depdikbud, Jakarta.
- Sismanto Y. (1984). *Pendidikan Luar sekolah dalam upaya mencerdaskan Bangsa*. CV Era Swasta, Jakarta.
- Sukamto (1983). *Pergeseran Peranan Pendidikan Kejuruan dan Implikasinya Terhadap Organisasi dan Pengembangan Kurikulum*. Pidato Dies IKIP Yogyakarta. Publikasi terbatas.
- Slamet PH. (1989). *Mengantisipasi Faktor-Faktor Eksternal Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Dalam Repelita V*. Cakrawala Pendidikan. No. 2 Tahun VIII, IKIP Yogyakarta.
- _____, *Teknologi Madya masih relevan*, Kedaulatan Rakyat 10 Juli 1989.
- Vembriarto ST. (1987). *Reform Sistem Persekolahan Merupakan Keniscayaan untuk Menyongsong Tahap Tinggal Landas*. Makalah Pada Seminar III - ISPI DIY. Publikasi terbatas.